

## **Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Medan dan Upaya Penyelesaiannya**

**Budi Syahputra<sup>1</sup>, Hidayat<sup>2</sup>, Ichwan Azhari<sup>3</sup>**

1) Antropologi Sosial, Program Pasca Sarjana Unimed, Indonesia.

2) Antropologi Sosial, Program Pasca Sarjana Unimed, Indonesia.

3) Antropologi Sosial, Program Pasca Sarjana Unimed, Indonesia.

Corresponding author: E-mail : budisyahputra888@gmail.com

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui akar terjadinya konflik antar organisasi kemasyarakatan dan Upaya penyelesaiannya oleh Organisasi Kepemudaan di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akar konflik terjadi diakibatkan salah satu organisasi mengambil alih kekuasaan di suatu lokasi, padahal lokasi tersebut dikuasai oleh organisasi kepemudaan lainnya. Konflik tersebut dapat menimbulkan tindak kriminalitas dan pengrusakan fasilitas publik, sehingga dapat mengancam keamanan masyarakat. Lahan yang dikuasai tersebut didapatkan karena melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan dan *developer property* agar mendapatkan izin untuk menyediakan bahan material bangunan, tender penyediaan bahan proyek. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mediasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan pihak yang berwajib. Hasil dari penyelesaian konflik ini adalah disepakati kembali batas-batas wilayah yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda. Penggunaan symbol-simbol dan atribut organisasi diwarnai di tiang listrik sebagai tanda wilayah kekuasaan yang telah disepakati bersama.

**Kata Kunci:** *Konflik Lahan, OKP, Penyelesaian Konflik*

### **Abstract**

*This study aims to find out the root causes of conflict between social organizations and the resolution efforts by Youth Organizations in Medan City. The research method used is a qualitative method with an ethnographic approach and data collection techniques using participatory observation and interviews. The results of this study explain that the root of the conflict occurred because one organization took power in a location, even though that location was controlled by another youth organization. This conflict can lead to criminal acts and damage to public facilities, thus threatening the security of the community. The controlled land is obtained because of cooperation with the government and property developers to get permission to provide building materials, a tender for the supply of project materials. Efforts to resolve conflicts are carried out through mediation with the Indonesian Youth National Committee and the authorities. The result of this conflict resolution was that the boundaries of the territory claimed as the territory of a youth social organization were re-agreed. The use of symbols and organizational attributes colored on electricity poles as a sign of mutually agreed territory.*

**Keyword :** *Land Conflict, OKP and Conflict Resolution*

## I. Pendahuluan

Dikota Medan setidaknya ada 4 (empat) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang memiliki kekuasaan terhadap ruang publik yaitu Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) yang terbilang besar, eksis dan terorganisir di Kota Medan. fenomena keberadaan OKP saat ini telah menimbulkan kegelisahan bagi sebagian besar masyarakat akibat pola tingkah laku di level terbawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat., seperti yang dikatakan Amin (2005) dalam penelitiannya tentang “Politik Organisasi Pemuda Tingkat Lokal” bahwa Organisasi kepemudaan sudah menjadi organisasi preman karena mereka sering melakukan aktivitas premanisme seperti kekerasan, menyakiti dan bahkan membunuh untuk mendapatkan uang serta kekuasaan, disamping itu mereka ikut berpolitik untuk mendapatkan perlindungan dari elite partai. OKP di Kota Medan sebenarnya merupakan garda atau penyokong garis bawah dari partai-partai politik, sehingga mereka dapat leluasa melakukan okupasi tanpa harus bersinggungan dengan pemerintah atau pihak terkait karena sudah di decking oleh anggota partai yang telah duduk di pemerintahan.

Dengan mempertahankan zona kekuasaan atau bahkan untuk memperebutkan ruang publik yang dapat diklaim sebagai tempat mengais rezeki, kerap kali terjadi gesekan-gesekan akibat perebutan lahan dan ego sektoral yang mengakibatkan terjadinya perkelahian dan kerusuhan di Kota Medan dan sekali lagi tentunya akan sangat merugikan kepentingan masyarakat setta menimbulkan rasa antipati masyarakat banyak atas peran dan fungsi OKP. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan latar belakang atau akar dari terjadinya konflik antar OKP dan upaya yang dilakukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya. Konflik yang terjadi antara OKP pada dasarnya karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperebutkan lahan.
2. Mempertahankan eksistensi organisasi masing-masing
3. Merasa sakit (Thoha, 2004)

Selanjutnya Weber (2006) berpendapat bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam sebuah konflik pastilah akan menggunakan kekuasaan sebab kekuasaan dalam proses konflik sosial bagaikan oksigen bagi proses biologis tubuh kita betapa pun perbedaan masalah dan perasaan dari mereka. Kekuasaan tersebut digunakan untuk saling menaklukan (pertarungan curang) ataupun untuk saling bekerjasama (pertarungan jujur). Tentunya tindakan-tindakan dan perbuatan seperti ini yang tidak disukai masyarakat dan meresahkan masyarakat serta sekali lagi tentunya akan sangat merugikan kepentingan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan suatu proses yang dinamakan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkan. Interaksi tidak hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, tetapi juga bisa terjadi antara satu individu dengan kelompok individu, atau antara kelompok individu dengan kelompok individu lain.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dari Spradlay untuk memahami dan mengungkapkan tentang permasalahan yang diangkat dan hendak diteliti oleh peneliti. metode etnografi yang digunakan oleh peneliti adalah di kenal dengan nama, Developmental Research Sequence atau Alur Penelitian Maju Bertahap dan tujuan utamanya adalah memahami pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli (*native's point of view*), sehingga data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. (Spradlay, 1997:3) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi partisipasi dengan pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan data lapangan.

## III. Pembahasan

Konflik OKP yang sering terjadi di Kota Medan yaitu konflik antara OKP Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya, karena dianggap sebagai OKP yang memiliki kekuatan yang hampir seimbang. Menurut Budi (2020), terjadinya konflik tersebut di Kota Medan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Memperebutkan lahan

Setelah berdirinya organisasi Ikatan Pemuda Karya tahun 1987 oleh Olo Pangabean, maka organisasi Pemuda Pancasila sepertinya mendapatkan saingan dalam menguasai sumber kehidupan yang berada di jalanan, yang dimaksudkan adalah areal atau lahan untuk mencari makan. Lahan itu sebelumnya telah dikuasai oleh anggota Pemuda Pancasila, tetapi akhirnya harus terbagi dua dengan anggota Ikatan Pemuda Karya. Konflik yang terjadi umumnya adalah ditempat yang banyak menghasilkan uang, misalnya lahan parkir, pajak atau tempat pedagang yang banyak berjualan, dan pusat-pusat perbelanjaan. Banyak jatuh korban dari kedua belah pihak kelompok organisasi ini, ada yang luka maupun meninggal dunia, juga dari masyarakat banyak rumahnya yang rusak dan para pedagang banyak yang hancur tempat dagangannya karena dekat dengan tempat terjadinya konflik.

### 2. Mempertahankan eksistensi OKP masing-masing

Dalam rangkaian konflik tersebut, dapat dilihat begitu gigihnya masing-masing anggota OKP dalam mempertahankan eksistensi dari organisasinya. OKP berpikir bagaimana cara untuk menjatuhkan pihak lawan dan harus dapat kemenangan disetiap perlawanan, karena kemenangan itu akan dianggap sebagai kemenangan dari organisasi, dan kelompok yang menang akan semakin disegani oleh pihak yang lain. Masing-masing dari anggota OKP akan saling mempertahankan diri dalam membesarkan nama organisasi masing-masing. Anggota dari kedua organisasi ini apabila terkena musibah seperti kena

bacok, tikaman, ataupun meninggal dunia, biasanya akan mendapatkan bantuan atau dana dari orang-orang yang berada di dalam organisasinya masing-masing. Loyalitas anggota dari satu OKP akan terlihat saat mereka dihadapkan pada suatu masalah yang besar yang membawa-bawa nama organisasi, maka saat itulah rasa kebersamaan dan solidaritas itu akan timbul.

### 3. Dendam/ Sakit hati

Konflik antara OKP Pemuda Pancasila dan OKP Ikatan Pemuda Karya sering terjadi karena adanya kecemburuan dan sakit hati dari para anggotanya Organisasi Ikatan Pemuda Karya anggotanya banyak yang diperkerjakan menjadi penjaga pabrik dan satuan pengaman di perusahaan yang ada disekitar kota Medan, sehingga anggota Pemuda Pancasila menjadi tersaingi oleh kehadiran dari anggota Ikatan Pemuda Karya ini dan sakit hati oleh kehadiran anggota dari kelompok lain yang mengambil tempat kerjanya. Perasaan sakit hati ini juga dirasakan oleh anggota dari masing masing organisasi apabila mereka mempunyai masalah pribadi dan dikait-kaitkan dengan keberadaan mereka diorganisasi. Banyak anggota yang berasal dari Pemuda Pancasila yang beralih masuk menjadi anggota Ikatan Pemuda Karya, mereka ini merasa sakit hati karena tidak diperhatikan oleh organisasinya. Dan akhirnya anggota yang beralih masuk ke organisasi Ikatan Pemuda Karya inilah yang mengembosi keberadaan organisasi Pemuda Pancasila.

Dampak dari konflik yang terjadi antara organisasi PP dan organisasi IPK menyebabkan masyarakat menjadi antipati atau benci terhadap keberadaan kedua organisasi ini. Sering terjadi apabila ada keributan atau konflik, masyarakatlah yang selalu memberikan informasi kepada pihak keamanan agar cepat mengambil tindakan yang dianggap dapat meredam keributan tersebut. Masyarakat juga telah membuat kesepakatan diantara mereka, apabila aparat keamanan tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, maka masyarakatlah yang akan mengambil tindakan untuk melawan kelompok pemuda yang telah menimbulkan keonaran dan kekacauan disekitar daerah mereka tinggal ataupun daerah tempat mereka berjualan. Keamanan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak aman ditengah-tengah kelompok pemuda yang sedang konflik. Aktifitas masyarakat menjadi terganggu bahkan terhenti. Hal ini dapat dilihat dari situasi jalan-jalan yang sepi dan pajak yang banyak ditinggal para pedagang pada waktu konflik itu sering terjadi, sehingga mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang dan pasti kerugian ada pada masyarakat, karena harga-harga menjadi serba mahal.

Konflik antara organisasi Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya pernah terjadi sekitar tahun 1990 sampai sekitar tahun 2000, dan terakhir yang mengejutkan setelah lama berdamai, Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya konflik pada tahun 2016, yang menyebabkan dua orang anggota dari dua organisasi tersebut meninggal dunia. Sekarang konflik itu sudah tidak ada lagi setelah pimpinan kedua organisasi itu dipertemukan oleh pihak yang dapat menjadi mediator untuk dapat menjamin bahwa konflik tersebut dapat dituntaskan, dan masing-masing organisasi dapat menjaga anggotanya agar tidak membuat keonaran yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan dari masyarakat.

Akibat konflik tersebut masyarakat jugalah yang terkena sasarannya apabila ada kerusuhan dari setiap kelompok yang membuat kekacauan. Penyelesaian konflik yang baik adalah dengan mempertemukan pimpinan dari dua kelompok yang sedang mengalami konflik dan masing-masing kelompok atau organisasi menyampaikan pendapatnya masing-masing secara terbuka dan tanpa ada yang ditutupi. Pertemuan seperti itu biasanya membuahkan hasil dan merupakan titik awal dalam menanggulangi tingkat konflik yang terjadi. Hal seperti itulah yang terjadi pada organisasi Pemuda Pancasila dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya setelah adanya kesepakatan damai. Masing-masing anggota organisasi harus patuh kepada perintah ketua organisasinya, terkadang masih saja ada anggota yang melanggar kesepakatan damai padahal sudah ada dibuat sanksinya, apabila anggota dari kedua belah pihak mulai terlibat konflik dan membuat onar, maka sudah ada hukumannya yaitu masuk penjara. Konsep kemandirian selalu akan mengarah kepada kemampuan untuk mengurus sendiri setiap pelaksanaan kegiatan tanpa ada ketergantungan kepada pihak lain, namun kemandirian tersebut bukan berarti tidak memerlukan kerja sama, karena hal yang terpenting menyangkut kemandirian adalah kemampuan untuk berprakarsa dan kemampuan untuk merealisasikan prakarsa itu berdasarkan potensi yang tersedia.

Dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian tersebut telah diberi pijakan yang kuat, yaitu dengan pengaturan bahwa organisasi kemasyarakatan mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama didalam menjalankan perannya. Ini berarti bahwa kehidupan organisasi kemasyarakatan di dalam melaksanakan programnya akan lebih banyak tergantung kepada kapasitas dan kemandirian organisasi kemasyarakatan tersebut.

Kebanyakan OKP di Sumatera Utara dibentuk menjadi satu organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk menghimpun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota. Untuk mengembangkan dan mendaya gunakan potensi inilah, maka OKP seperti Pemuda Pancasila dalam program kerjanya yang ditetapkan bersifat program kerja mandiri, yaitu program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila, tetapi ada juga program kerja sama Pemuda Pancasila dengan Organisasi masyarakat lainnya dan instansi pemerintah yang sifatnya mendukung kesuksesan dari program Pemuda Pancasila khususnya di kota Medan.

Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) menjadi lebih bersifat independen dan dapat mengambil sikap dan keputusannya sendiri, kalau diamati mulai dari sejarah terbentuknya organisasi Pemuda Pancasila, didalam perkembangannya masih memerlukan pembenahan-pembenahan baik dalam masalah intern organisasi maupun dalam kegiatan ekstern organisasi. Selain konflik antara Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya, pernah juga terjadi konflik yang tidak kalah hebat, yaitu konflik antara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dengan FKPP di sekitaran Medan Barat dan Medan Perjuangan, yang menyebabkan salah satu ketua ranting AMPI meninggal dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perebutan lahan yang dijual oleh ketua AMPI kepada pengelola kompleks perumahan Mutiara Palace, ia menjual seluruh lahan untuk dijadikan perumahan dan sirkuit mini pancing. Apabila dilihat, sebelum kejadian itu, mini pancing tidak



memiliki tembok pembatas dan pegelaran moto race dan contest sering dilaksanakan di daerah ini, tetapi sekarang sudah ditembok oleh OKP yang diklaim OKP FKPPi.

Konflik yang terjadi diantara OKP di kota Medan memberikan ketegangan ditengah kehidupan masyarakat, hal ini dilator belakangi timbulnya korban jiwa dalam setiap pertikaian yang terjadi. Disamping itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh pertikaian ini tidak sedikit, biasanya para anggota OKP merusak fasilitas umum untuk mendapatkan alat atau senjata yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan, selain itu, perusakan fasilitas umum diharapkan dapat memberikan suasana heboh atau mencekam bagi masyarakat sekitar, agar masyarakat mengetahui betapa hebatnya kekuatan dan eksistensi OKP tersebut., sehingga membuat masyarakat berpikir panjang untuk berurusan dengan OKP.



**Foto 1. Penyelesaian Konflik dengan cara Mediasi**

Selain memperebutkan lahan mencari makan, konflik yang dilakukan oleh OKP semata-mata untuk memperlihatkan kekuatan satu sama lain, agar masyarakat dapat melihat kekuatan tersebut, dengan memperlihatkan kekuatan itu, maka masyarakat akan merasa takut, sehingga membutuhkan keamanan agar tidak diganggu. Disaat inilah eksistensi OKP kembali didapatkan dan dengan mudah masuk kembali di tengah masyarakat, maksud dari mudah masuk kembali di tengah masyarakat adalah OKP tersebut akan diterima apabila meminta dana keamanan diteritori OKP tersebut.



**Foto 2. Penggunaan atribut sebagai batas wilayah yang telah disepakati**

Penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara petinggi kedua OKP, yang di mediasi oleh pihak KNPI, Polisi dan TNI. Hasil dari musyawarah tersebut adalah mempertegas kembali zonasi territorial kekuasaan OKP PP dan IPK, dimana Kecamatan Medan Area dan khususnya jalan Thamrin-Sutrisno merupakan daerah kekuasaan PP dan seharusnya IPK dilarang konvoi di daerah tersebut.

Istilahnya Kecamatan Medan Area merupakan markas besar (Mabes) PP, sementara Mabes IPK di Medan Petisah. Dari musyawarah tersebut juga terdengar bahwa nama pendiri IPK dibawa-bawa, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu petinggi PP, pernyataan tersebut berbunyi “jangan kalian, mendiang bang olo aja g mau lewat dari sini”. Pernyataan ini jelas mempertegas zonasi territorial PP, bahwa Medan Area dan sekitarnya merupakan basis PP. Akar dari permasalahan konflik PP dan IPK yang sempat menghebohkan kota Medan pada tahun 2016 itu dikarenakan tidak terimanya anggota PP lahan territorialnya dilewati oleh anggota IPK dengan memakai atribut lengkap dan berbondong-bondong atau konvoi, sehingga ditegur, ketika teguran tak dihiraukan, maka terjadilah konflik. Begitu juga sebaliknya, ketika rombongan PP melewati jalan Sekip atau Medan Petisah secara konvoi, maka konflik pun tidak bisa dielakkan.



Foto 3. Zonasi Kekuasaan OKP (Merah (PP), Biru Langit (IPK), Biru Laut (AMPI), dan Biru Tua (FKPP))

Budi (2020) mengatakan bahwa penyelesaian konflik PP dan IPK di Kota Medan biasanya dilakukan dengan cara mediasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Polisi dan TNI, dengan cara mempertegas dan menyepakati zonasi pembagian daerah yang diklaim sebagai daerah kekuasaan. Dari hasil musyawarah tersebut, memperlihatkan bahwa pembagian wilayah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para petinggi OKP sebenarnya sudah memiliki perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan konflik lagi dalam penguasaan lahan. Daerah yang dikuasai akan diberikan plank dan symbol yang menandakan batas wilayah kekuasaan, biasanya plank akan didirikan di depan sekretariat dan simbol-simbol batas wilayah digambarkan melalui media tiang listrik ataupun tembok.

Dengan memberikan cat yang sama dengan seragam OKP, maka daerah itu otomatis menjadi daerah kekuasaan OKP tersebut, apabila ada OKP lain yang mengambil keuntungan dalam wilayah itu, maka konflik merupakan jalan terbaik, karena memberikan efek jera kepada OKP yang ingin merebut daerah tersebut. Apabila OKP yang menguasai daerah tersebut kalah dalam bentrokan atau pasukan OKP tidak dapat mempertahankannya.



Pergantian penguasaan bisa saja terjadi, tetapi hal ini tidak akan lama, karena OKP yang awalnya menguasai daerah tersebut akan menghimpun kembali kekuataannya, sehingga lama-kelamaan dapat merebutnya kembali, hal ini yang mendasari sering terjadinya konflik antar OKP di Kota Medan.

## Kesimpulan

Konflik yang terjadi antar OKP di Kota Medan sebenarnya dikarenakan adanya pengambilan lahan oleh salah satu OKP, padahal lahan tersebut dikuasai oleh OKP lainnya. Pengambilan lahan ini tanpa adanya kesepakatan antar OKP, sehingga dapat menimbulkan konflik yang berakibatkan pengrusakan, kriminalitas dan korban jiwa. Disamping itu, konflik ini juga dianggap sebagai cara untuk mengeksekusi kekuatan OKP yang dianggap telah redup, sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar.

Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan bantuan oleh berbagai pihak seperti petinggi OKP, KNPI bahkan pihak aparat. Penyelesaian konflik dengan menyepakati kembali batas-batas lahan yang dikuasai dan melakukan perjanjian agar tidak melanggar batas-batas wilayah. pembagian wilayah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para petinggi OKP sebenarnya sudah memiliki perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan konflik lagi dalam penguasaan lahan. Daerah yang dikuasai akan diberikan plank dan symbol yang menandakan batas wilayah kekuasaan, biasanya plank akan didirikan di depan sekretariat dan simbol-simbol batas wilayah digambarkan melalui media tiang listrik ataupun tembok. Dengan memberikan cat yang sama dengan seragam OKP, maka daerah itu otomatis menjadi daerah kekuasaan OKP tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abdul, Thaha. 1997. *Pemuda Dan Perubahan Sosial*. LP3ES. Jakarta
- Aziz, Munawwir. 2013. *Identitas Pemuda Tionghoa Pasca Reformasi: Nasionalisme dalam Transformasi Kepemimpinan pada Organisasi Sosial di Lasem, Jawa Tengah*. Jurnal Studi Pemuda. UGM.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: wacana dan teoritis Penafsiran Teks*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta
- Fitrah. Elpeni. 2016. *Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi ASEAN Community 2015*. Jurnal Insigna. UJS
- Hiryanto. 2015. *Pengembangan model pelatihan kepemimpinan bagi organisasi kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. UNY
- Mujiarjo. 2011. *Okupasi Terhadap Ruang Publik Perkotaan*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Muryanto, A. 2005. *Politik Organisasi Pemuda Tingkat Lokal ( Kasus keterlibatan Pemuda Pancasila(PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan FKPPi dalam pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Kota Medan*. PPs Ilmu Politik: Universitas Indonesia

- Nurdiansyah, Edwin. 2013. *Peran Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Dalam Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. UPI
- Spradley, P. James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Susilawati. 2017. *Peran Organisasi Kepemudaan Sebagai Komponen Pendukung Dalam Sistem Pertahanan Semesta (Studi Pada: Ikatan Pemuda Karya, Di Kota Medan)*. Jurnal Peperangan Asimetris. Universitas Pertahanan.
- Syahputra, Budi. 2020. *Pola Okupasi Ruang Publik Oleh Organisasi Kepemudaan di Kota Medan Sumatera Utara*. JUPIIS
- Widiatmaka. Pipit. 2016. *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah)*. JKN. UGM